

BAB II

LANDASAN TEORITIS

Pada bab ini akan dipaparkan topik-topik bahasan yang dijadikan sebagai dasar teoritis dalam penyusunan hipotesis, penyusunan instrumen, maupun pembahasan hasil pengolahan data, sehingga pada akhirnya penulis akan dapat menarik simpulan dari penelitian ini. Topik-topik bahasan utama adalah tentang sikap, sekolah inklusif, dan hasil-hasil penelitian tentang sikap guru terhadap sekolah inklusif.

A. Sikap

1. Pengertian

Banyak definisi sikap yang dikemukakan oleh para ahli. Secara umum, definisi-definisi tersebut dapat dikelompokkan kedalam tiga kerangka pemikiran (Azwar, 2009:4).

Kerangka pemikiran pertama memandang bahwa sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak (*favorable*) maupun perasaan tidak mendukung (*unfavorable*) pada objek tersebut (Berkowitz, dalam Azwar, 2009:4).

Kelompok pemikiran kedua memandang sikap sebagai kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu. Yang dimaksud dengan

Untuk sitasi (*citation*), tuliskan: Herlina. (2010). *Sikap Guru Sekolah Dasar terhadap Penyelenggaraan Sekolah Inklusif*. Bandung: Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. (Tesis)

kesiapan yaitu kecenderungan potensial untuk bereaksi dengan cara tertentu apabila individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respon. Sikap didefinisikan sebagai “suatu pola perilaku, tendensi atau kesiapan antisipatif, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial, atau secara sederhana, sikap adalah respons terhadap stimuli sosial yang telah terkondisikan (LaPiere, 1934, dalam Azwar, 2009:5).

Kelompok pemikiran ketiga disebut sebagai kelompok yang berorientasi skema triadic. Berdasarkan pemikiran yang berorientasi pada skema triadic, sikap dipandang sebagai suatu konstelasi komponen-komponen kognitif, afektif, dan konatif yang saling berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap suatu objek (Azwar, 2009:5).

Menurut Secord & Backman (Azwar, 2009:5), sikap adalah keteraturan tertentu dalam hal perasaan (afeksi), pemikiran (kognisi), dan predisposisi tindakan (konasi) seseorang terhadap suatu aspek di lingkungan sekitarnya.

Allport (Mar’at, 1982:13) mendefinisikan sikap sebagai ‘*an attitude toward any given object, idea, or person is an enduring system with a cognitive component, an affective component, and a behavioral tendency*’.

2. Ciri Sikap

Berdasarkan berbagai definisi sikap, Mar’at (1982:20) merangkum tentang beberapa ciri sikap, yaitu:

Untuk sitasi (*citation*), tuliskan: Herlina. (2010). *Sikap Guru Sekolah Dasar terhadap Penyelenggaraan Sekolah Inklusif*. Bandung: Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. (Tesis)

- a. *attitude are learned*, yang berarti sikap tidaklah merupakan sistem fisiologis atau diturunkan, melainkan merupakan hasil belajar yang diperoleh seseorang melalui pengalaman dan interaksinya yang terus menerus dengan lingkungannya.
- b. *attitudes have referent*, yang berarti bahwa sikap selalu dihubungkan dengan objek, seperti manusia, benda, wawasan, peristiwa, ataupun ide. Edward (1969, dalam Mar'at, 1982) menyebut objek sikap sebagai "*psychological object*".
- c. *attitudes are social learning*, yang berarti bahwa sikap diperoleh dalam berinteraksi dengan manusia lain, baik di rumah, sekolah, tempat ibadah, atau tempat lainnya melalui nasihat, teladan, atau percakapan.
- d. *attitudes have readiness to respond*, yang berarti adanya kesiapan untuk bertindak dengan cara-cara tertentu terhadap objek.
- e. *attitudes are affective*, yang berarti bahwa perasaan dan afeksi merupakan bagian dari sikap, akan tampak pada pilihan yang bersangkutan, apakah positif, negatif, atau ragu.
- f. *attitudes are very intensive*, yang berarti bahwa tingkat intensitas sikap terhadap objek tertentu makin kuat atau juga lemah.
- g. *attitudes have a time dimension*, yang berarti bahwa sikap tersebut mungkin saja hanya cocok pada situasi yang sedang berlangsung, dan belum tentu sesuai pada situasi lain. Oleh karena itu, sikap dapat berubah tergantung pada situasi.

Untuk sitasi (*citation*), tuliskan: Herlina. (2010). *Sikap Guru Sekolah Dasar terhadap Penyelenggaraan Sekolah Inklusif*. Bandung: Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. (Tesis)

- h. *attitudes have duration factors*, yang berarti bahwa sikap dapat bersifat relatif konsisten dalam hidup manusia.
- i. *attitudes are complex*, yang berarti bahwa sikap merupakan bagian dari konteks persepsi ataupun kognisi individu.
- j. *attitudes are evaluations*, yang berarti bahwa sikap merupakan penilaian terhadap sesuatu yang mungkin mempunyai konsekuensi tertentu bagi yang bersangkutan.
- k. *attitudes are inferred*, yang berarti bahwa sikap merupakan penafsiran dari tingkah laku, yang mungkin menjadi indikator sempurna, atau bahkan tidak memadai.

3. Komponen-Komponen Sikap

Menurut skema triadic, sikap terdiri atas 3 komponen yang saling berinteraksi, yaitu komponen kognitif, afektif, dan konatif.

Komponen kognitif berisi persepsi, keyakinan, ide, dan konsep dalam diri seseorang mengenai objek sikap. Keyakinan seseorang mengenai suatu objek tentang apa yang telah dilihat atau diketahuinya, yang memberinya ide tentang karakteristik umum objek tersebut. Jadi, komponen kognitif akan menjawab pertanyaan apa yang dipikirkan atau dipersepsikan tentang objek (Shaver, dalam Mar'at, 1982:21).

Komponen afektif berkaitan dengan perasaan emosional subjektif seseorang terhadap suatu objek sikap. Menurut Mann (1969), dalam Azwar (2009:24), aspek emosional inilah yang biasanya berakar paling dalam sebagai komponen sikap dan merupakan aspek yang paling bertahan terhadap pengaruh-pengaruh yang mungkin akan mengubah sikap seseorang. Pada umumnya reaksi emosional terhadap suatu objek, yang merupakan komponen afektif, banyak dipengaruhi oleh keyakinan atau apa yang diyakini benar dan berlaku bagi objek tersebut. Berarti, komponen afektif menjawab pertanyaan tentang apa yang dirasakan (senang/tidak senang) terhadap objek (Shaver, dalam Mar'at, 1982:21).

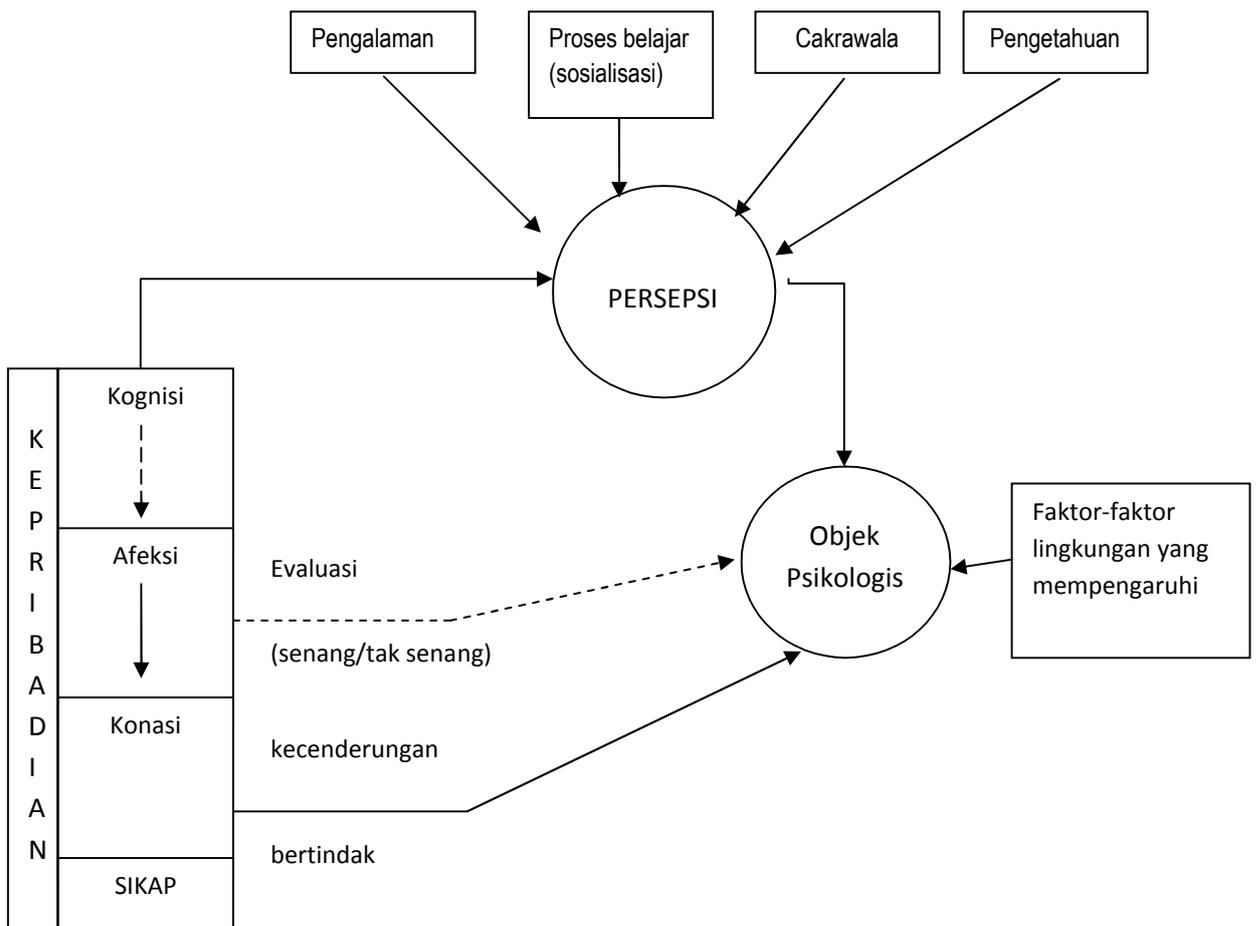
Komponen konatif merupakan kecenderungan untuk berperilaku dengan cara-cara tertentu, yang ada dalam diri seseorang berkaitan dengan objek sikap yang dihadapinya. Komponen konasi akan menjawab pertanyaan bagaimana kesediaan/kesiapan untuk bertindak terhadap objek (Shaver, dalam Mar'at, 1982:21).

Ketiga komponen ini saling berinteraksi. Sikap merupakan kumpulan dari berpikir, keyakinan, dan pengetahuan tentang suatu objek. Jadi, terdapat penalaran/penilaian seseorang terhadap objek mengenai karakteristiknya. Penilaian seseorang terhadap suatu objek sikap bisa diperoleh melalui pengalaman langsung berdasarkan interaksi maupun pengalaman tidak langsung (misalnya melalui berita/cerita). Berdasarkan evaluasi kognitif ini, komponen afektif memiliki evaluasi negatif maupun positif yang bersifat emosional, yang muncul dalam perasaan senang/tidak senang, atau takut/tidak takut.

Untuk sitasi (*citation*), tuliskan: Herlina. (2010). *Sikap Guru Sekolah Dasar terhadap Penyelenggaraan Sekolah Inklusif*. Bandung: Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. (Tesis)

Pengetahuan dan perasaan akan menghasilkan kecenderungan tingkah laku tertentu terhadap objek tersebut.

Jika dibuat dalam bentuk bagan, maka interaksi ketiga komponen sikap dapat digambarkan sebagai berikut (Mar'at, 1982:23):



Gambar 2.1. Proses Interaksi Komponen Sikap (Mar'at, 1982: 23)

Gambar di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Persepsi merupakan proses pengamatan seseorang yang berasal dari komponen kognisi. Persepsi ini

dipengaruhi oleh faktor-faktor pengalaman, proses belajar, cakrawala, dan Untuk sitasi (*citation*), tuliskan: Herlina. (2010). *Sikap Guru Sekolah Dasar terhadap Penyelenggaraan Sekolah Inklusif*. Bandung: Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. (Tesis)

pengetahuannya. Manusia mengamati suatu objek psikologis dengan kacamata sendiri yang diwarnai oleh nilai dari kepribadiannya. Objek psikologis ini bisa berupa kejadian, ide, atau situasi tertentu. Faktor pengalaman, proses belajar, atau sosialisasi memberikan bentuk dan struktur terhadap apa yang dilihat, sedangkan pengetahuan dan cakrawalanya memberikan arti terhadap objek psikologis tersebut. Melalui komponen kognisi ini akan timbul ide, kemudian konsep mengenai apa yang dilihat. Berdasarkan nilai dan norma yang dimiliki pribadi seseorang akan terjadi keyakinan (belief) terhadap objek tersebut.

Selanjutnya, komponen afeksi memberikan evaluasi emosional (senang atau tidak senang) terhadap objek.

Pada tahap selanjutnya, berperan komponen konasi yang menentukan kesediaan/kesiapan jawaban berupa tindakan terhadap objek (Mar'at, 1982:23).

4. Pembentukan Sikap dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya

Sikap lebih dipandang sebagai hasil belajar daripada sebagai hasil perkembangan atau sesuatu yang diturunkan (Mar'at, 1982:17). Sikap diperoleh melalui interaksi dengan objek sosial atau peristiwa sosial. Jadi, dalam interaksi sosial individu akan membentuk suatu pola sikap tertentu terhadap objek sikap yang dihadapinya.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terbentuknya sikap (Azwar, 2009:30), yaitu:

Untuk sitasi (*citation*), tuliskan: Herlina. (2010). *Sikap Guru Sekolah Dasar terhadap Penyelenggaraan Sekolah Inklusif*. Bandung: Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. (Tesis)

a. *Pengalaman Pribadi.*

Tanggapan akan menjadi salah satu dasar terbentuknya sikap. Untuk dapat mempunyai tanggapan dan penghayatan, seseorang harus mempunyai pengalaman yang berkaitan dengan objek psikologis. Apakah penghayatan itu kemudian akan membentuk sikap positif atau negatif, akan tergantung pada berbagai faktor lain. Menurut Middlebrook (1974, dalam Azwar, 2009:31), tidak adanya pengalaman sama sekali dengan suatu objek psikologis cenderung akan membentuk sikap negatif terhadap objek tersebut.

Untuk dapat menjadi dasar pembentukan sikap, pengalaman pribadi harus meninggalkan kesan yang kuat. Oleh karena itu, sikap akan lebih mudah terbentuk apabila pengalaman pribadi tersebut terjadi dalam situasi yang melibatkan faktor emosional.

b. *Pengaruh Orang Lain yang Dianggap Penting*

Seseorang yang kita anggap penting, seseorang yang kita harapkan persetujuannya bagi setiap gerak tingkah dan pendapat kita, seseorang yang tidak ingin kita kecewakan, atau seseorang yang berarti khusus bagi kita (*significant others*), akan banyak mempengaruhi pembentukan sikap kita terhadap sesuatu. Diantara orang yang biasanya dianggap penting bagi individu adalah orangtua, orang yang status sosialnya lebih tinggi, teman sebaya, teman dekat, guru, teman kerja, istri atau suami, dan lain-lain.

Pada umumnya individu cenderung untuk memiliki sikap yang konformis atau searah dengan sikap orang yang dianggapnya penting. Kecenderungan ini antara lain dimotivasi oleh keinginan untuk berafiliasi dan keinginan untuk menghindari konflik dengan orang yang dianggap penting tersebut.

c. *Pengaruh kebudayaan*

Kebudayaan dimana kita hidup dan dibesarkan akan mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan sikap. Kebudayaan menanamkan garis pengarah sikap terhadap masalah dan kebudayaan pula yang telah mewarnai sikap masyarakat, karena kebudayaan telah memberi corak pengalaman individu-individu yang menjadi anggota kelompok masyarakat.

d. *Media Massa*

Media massa memiliki pengaruh dalam proses pembentukan sikap dan perubahannya, meskipun pengaruhnya tidak sebesar pengaruh interaksi individual. Dengan adanya informasi baru yang disampaikan oleh media massa mengenai suatu hal dapat memberikan landasan kognitif baru bagi terbentuknya sikap mengenai hal tersebut. Pesan-pesan sugestif yang dibawa oleh informasi tersebut, bila cukup kuat akan memberi dasar afektif dalam menilai sesuatu sehingga terbentuk arah sikap tertentu pula.

e. *Pengaruh Faktor Emosional*

Terkadang, suatu bentuk sikap merupakan pernyataan yang didasari oleh emosi, yang berfungsi sebagai semacam frustrasi atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego.

Untuk sitasi (*citation*), tuliskan: Herlina. (2010). *Sikap Guru Sekolah Dasar terhadap Penyelenggaraan Sekolah Inklusif*. Bandung: Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. (Tesis)

f. Lembaga Pendidikan dan Lembaga Agama

Lembaga pendidikan dan lembaga agama merupakan suatu sistem yang mempunyai pengaruh dalam pembentukan sikap dikarenakan keduanya meletakkan dasar pengertian dan konsep moral dalam diri individu. Dalam hal ini, ajaran yang diperoleh dalam lembaga pendidikan dan lembaga agama seringkali menjadi determinan tunggal yang menentukan sikap.

Ahmadi (2002) mengatakan bahwa pembentukan sikap dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu:

- a. Faktor Intern***, yaitu faktor yang terdapat dalam pribadi manusia itu sendiri. Faktor ini berupa daya pilih seseorang untuk menerima dan mengolah pengaruh-pengaruh yang datang dari luar. Daya pilih ini sering disebut *selectivity*.
- b. Faktor Ekstern***, yaitu faktor yang terdapat di luar pribadi manusia, yang berupa interaksi sosial di luar kelompok, misalnya interaksi antara manusia dengan hasil kebudayaan manusia yang sampai kepadanya melalui alat-alat komunikasi seperti surat kabar, radio, televisi, majalah, dan sebagainya.

5. Hubungan Sikap dan Perilaku.

Untuk sitasi (*citation*), tuliskan: Herlina. (2010). *Sikap Guru Sekolah Dasar terhadap Penyelenggaraan Sekolah Inklusif*. Bandung: Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. (Tesis)

Sebagaimana dijelaskan dalam definisi sikap di atas, sikap merupakan suatu kesiapan/kecenderungan untuk berperilaku dengan cara-cara tertentu terhadap suatu objek. Artinya, sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktivitas.

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menguji hubungan sikap dengan perilaku. Penelitian La Piere (1934, dalam Ajzen & Fishbein, 2005) menunjukkan bahwa tidak ada konsistensi antara sikap simbolik dengan perilaku aktual. Demikian pula dengan beberapa penelitian lain, menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antara sikap dengan perilaku (Corey, 1937; Blumer, 1955; Campbel, 1963; Deutscher, 1966, Festinger, 1964, dalam Ajzen & Fishbein, 2005). Sementara hasil penelitian lain menunjukkan adanya indikasi hubungan yang kuat antara sikap dan perilaku (Wicker, 1969, dalam Ajzen & Fishbein, 2005).

Warner dan DeFleur (Azwar, 2009:16) mengemukakan tiga postulat untuk mengidentifikasi tiga pandangan umum mengenai hubungan sikap dan perilaku, yaitu postulat konsistensi (*postulate of consistency*), postulat variasi independen (*postulate of independent variation*), dan postulat konsistensi tergantung (*postulate of contingent consistency*), seperti dijelaskan di bawah ini:

a. *Postulat Konsistensi*

Postulat ini menyatakan bahwa sikap verbal merupakan petunjuk yang cukup akurat untuk memprediksikan apa yang akan dilakukan seseorang bila ia dihadapkan pada suatu objek sikap.

Jadi, postulat ini mengasumsikan adanya hubungan langsung antara sikap dan perilaku. Postulat ini terbukti pada pola perilaku individu yang memiliki sikap ekstrem, karena individu yang memiliki sikap ekstrem cenderung untuk berperilaku yang didominasi oleh keestreman sikapnya itu, sedangkan individu yang memiliki sikap moderat akan berperilaku yang didominasi oleh faktor-faktor lain.

b. Postulat Variasi Independen

Postulat ini mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk menyimpulkan bahwa sikap dan perilaku berhubungan secara konsisten. Sikap dan perilaku merupakan dua dimensi dalam diri inidividu yang berdiri sendiri, terpisah, dan berbeda. Mengetahui sikap tidak berarti memprediksi perilaku.

c. Postulat Konsistensi Tergantung

Postulat ini menyatakan bahwa hubungan sikap dan perilaku sangat ditentukan oleh faktor-faktor situasional tertentu. Norma-norma, peran, keanggotaan kelompok, kebudayaan, dan sebagainya merupakan kondisi ketergantungan yang dapat mengubah hubungan sikap dan perilaku. Oleh karena itu, sejauh mana prediksi perilaku dapat disandarkan pada sikap akan berbeda dari waktu ke waktu dan dari situasi ke situasi lainnya.

Menurut Allen, Guy, dan Edgley (Azwar, 2009:17), postulat ini merupakan postulat yang paling masuk akal dan paling berguna dalam menjelaskan hubungan sikap dan perilaku.

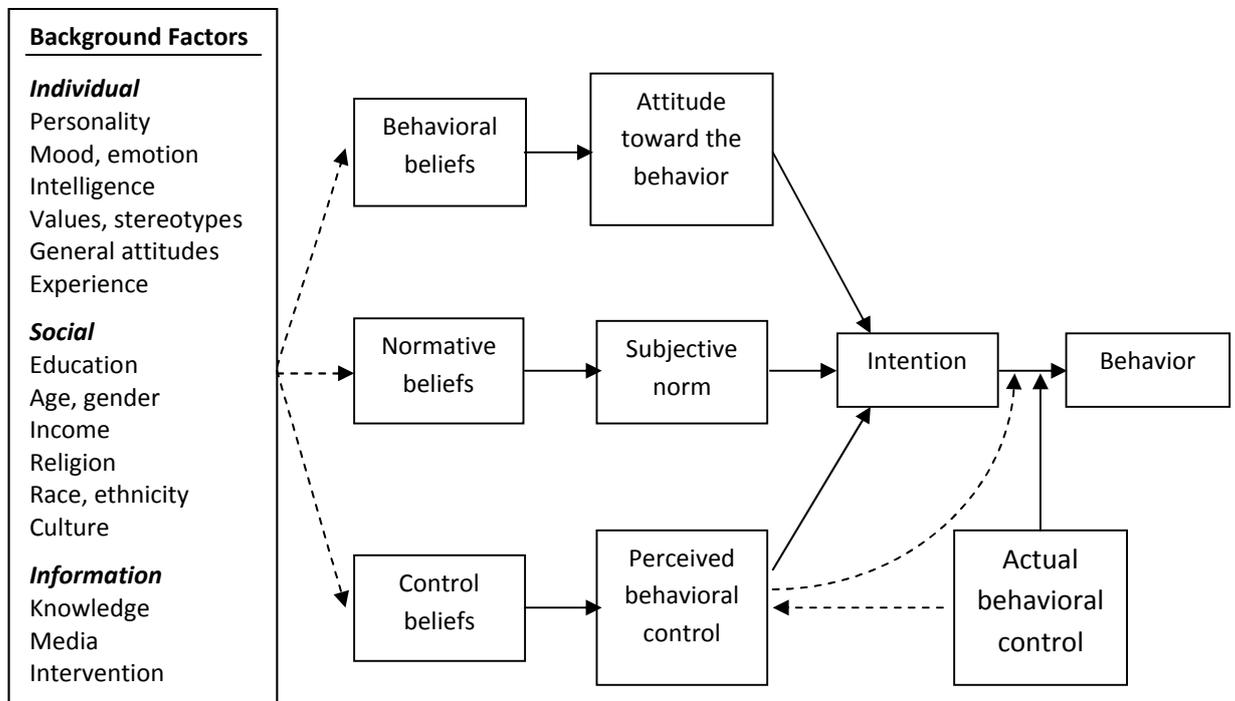
Untuk sitasi (*citation*), tuliskan: Herlina. (2010). *Sikap Guru Sekolah Dasar terhadap Penyelenggaraan Sekolah Inklusif*. Bandung: Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. (Tesis)

Ajzen & Fishbein (2005) menyatakan bahwa sikap secara umum tidak berhubungan dengan perilaku. Sikap akan dapat memprediksi perilaku hanya jika pengukurannya memenuhi syarat agregasi (aggregation) dan kompatibilitas (compatibility). Agregasi berarti pengukuran sikap harus mewakili semua domain sikap (kognitif, afektif, dan konatif) sedangkan kompatibilitas berarti pengukuran sikap dan perilaku harus benar-benar sama dalam elemen tindakan, target, konteks, dan waktu, yang ditetapkan dalam tingkat yang sangat spesifik atau lebih umum (Ajzen & Fishbein, 2005: 180-183). Pratkanis, *et.al* (1989) menyatakan bahwa untuk memprediksi perilaku, pengukuran sikap yang tepat harus mencakup seluruh komponen sikap, yaitu kognitif, afektif, dan konatif (Pratkanis, *et.al.*, 1989:254).

Icek Ajzen (1988) mengemukakan Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*), yang menyatakan bahwa keyakinan-keyakinan berpengaruh pada sikap terhadap perilaku tertentu, pada norma-norma subjektif, dan pada kontrol perilaku yang dihayati. Ketiga komponen ini berinteraksi dan menjadi determinan bagi intensi yang pada gilirannya akan menentukan apakah perilaku yang bersangkutan akan dilakukan atau tidak (Azwar, 2009:12). Menurut Fishbein & Ajzen (1975), sikap (*attitude*) dapat dikonseptualisasikan sebagai sejumlah afek terhadap objek (Fishbein & Ajzen, 1975:11), sedangkan *intention* dipandang sebagai komponen konatif dari sikap dan berhubungan dengan komponen afektif dari sikap (Fishbein & Ajzen, 1975: 289).

Untuk sitasi (*citation*), tuliskan: Herlina. (2010). *Sikap Guru Sekolah Dasar terhadap Penyelenggaraan Sekolah Inklusif*. Bandung: Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. (Tesis)

Hubungan diantara ketiganya dapat dijelaskan dalam gambar berikut (Ajzen & Fishbein, 2005:194):



Gambar 2.2.

Teori Perilaku Terencana menurut Ajzen dan Fishbein (2005:194)

Gambar di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Berdasarkan teori perilaku terencana, tindakan manusia diarahkan oleh tiga jenis pertimbangan, yaitu: *behavioral beliefs*, *normative beliefs*, dan *control beliefs*.
- *Behavioral beliefs* adalah keyakinan tentang konsekuensi positif atau negatif yang paling mungkin muncul dari perilaku (Ajzen & Fishbein, 1980; Fishbein & Ajzen, 1975), harapan tentang hasil (Bandura, 1977), atau untung rugi (Becker, 1974). Keyakinan-keyakinan ini diasumsikan akan

Untuk sitasi (*citation*), tuliskan: Herlina. (2010). *Sikap Guru Sekolah Dasar terhadap Penyelenggaraan Sekolah Inklusif*. Bandung: Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. (Tesis)

menghasilkan evaluasi atau sikap positif atau negatif terhadap perilaku yang akan ditampilkan (*attitude toward the behavior*). Jika keuntungan/manfaat yang ditimbulkan sebagai akibat menampilkan perilaku dipandang lebih besar daripada kerugian, maka orang akan membentuk sikap positif terhadap perilaku; demikian pula sebaliknya (Ajzen & Fishbein, 2005).

- *Normative beliefs* adalah keyakinan tentang perilaku yang diharapkan orang lain (perilaku normatif), tentang persetujuan atau celaan dari teman, anggota keluarga, teman sejawat, dan sebagainya terhadap perilaku yang akan ditampilkan. Keyakinan-keyakinan ini diasumsikan akan mengarah pada tekanan sosial yang dipersepsikan atau norma subjektif (*subjective norms*) untuk terlibat atau tidak terlibat dalam perilaku (Ajzen & Fishbein, 1980; Fishbein & Ajzen, 1975, dalam Ajzen & Fishbein, 2005). Apabila seseorang yakin bahwa sebagian besar orang yang dihormatinya mengharapkan dirinya menampilkan suatu perilaku atau justru mereka sendiri menampilkan perilaku tersebut, maka norma subjektif akan menekannya untuk terlibat dalam perilaku itu. Jadi, norma subjektif ditentukan oleh persepsi tentang harapan individu atau kelompok yang dihormati, dan oleh motivasi seseorang untuk memenuhi harapan tersebut. Norma subjektif sendiri didefinisikan sebagai “*the person’s perception that most people who are important to him think he should or should not perform the behavior in question*” (Fishbein & Ajzen, 1975:302).

- *Control beliefs* adalah keyakinan tentang keberadaan atau ketiadaan faktor-faktor yang mempermudah atau mempersulit untuk menampilkan perilaku.

Untuk sitasi (*citation*), tuliskan: Herlina. (2010). *Sikap Guru Sekolah Dasar terhadap Penyelenggaraan Sekolah Inklusif*. Bandung: Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. (Tesis)

Keyakinan-keyakinan ini mengarahkan pada persepsi seseorang bahwa dirinya memiliki atau tidak memiliki kapasitas untuk menampilkan suatu perilaku, yang disebut sebagai *perceived behavioral control* (Ajzen, 1991), atau oleh Bandura (1977) disebut sebagai efikasi diri (Ajzen & Fishbein, 2005). Menurut Feldman (1995, dalam Amaliah, 2008), *perceived behavioral control* (*PBC*) adalah persepsi tentang kesulitan atau kemudahan dalam melaksanakan perilaku, didasarkan pada pengalaman sebelumnya dan hambatan yang diantisipasi dalam melaksanakan perilaku tertentu. Orang-orang yang yakin bahwa dirinya memiliki keterampilan atau sumberdaya lain untuk menampilkan perilaku atau mengatasi hambatan akan mengembangkan rasa efikasi diri atau *PBC* yang kuat, dan sebaliknya. Namun, *PBC* akan lebih berperan meningkatkan kemampuan prediktif intensi terhadap perilaku pada perilaku yang kontrol *volitional*nya tinggi (benar-benar di bawah kemauan/kesadaran sendiri), dan tidak pada perilaku dengan kontrol *volitional* rendah.

- Secara bersama-sama, sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi tentang kontrol perilaku mengarah pada terbentuknya intensi perilaku. Makin *favorable* sikap dan norma subjektif, dan makin besar kontrol yang dipersepsikan, makin kuat intensi seseorang untuk menampilkan perilaku (Ajzen & Fishbein, 2000).
- Ada dua cara yang menghubungkan *PBC* dengan perilaku. *Pertama*, *PBC* berhubungan secara tidak langsung dengan perilaku melalui perantara intensi (pada gambar dihubungkan dengan garis panah utuh). Hubungan ini

Untuk sitasi (*citation*), tuliskan: Herlina. (2010). *Sikap Guru Sekolah Dasar terhadap Penyelenggaraan Sekolah Inklusif*. Bandung: Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. (Tesis)

didasari oleh asumsi bahwa *PBC* memiliki implikasi motivasional terhadap intensi. Individu yang memiliki keyakinan bahwa dirinya tidak mempunyai sumber daya atau kesempatan untuk menampilkan perilaku tertentu cenderung tidak membentuk intensi yang kuat untuk melakukannya, walaupun ia memiliki sikap yang positif dan percaya bahwa orang lain akan mendukung perilakunya. Kedua, hubungan secara langsung antara *PBC* dengan perilaku (digambarkan dengan garis putus-putus), tanpa melalui intensi. Hubungan antara *PBC* dengan perilaku diharapkan muncul hanya jika ada kesepakatan antara persepsi terhadap kontrol dengan kontrol aktualnya dalam derajat akurasi yang cukup tinggi (Ajzen, 2005, dalam Amaliah, 2008).

- Gambar di atas juga menunjukkan bahwa *behavioral beliefs*, *normative beliefs*, dan *control beliefs* tentang perilaku tertentu dipengaruhi oleh variasi yang luas dari faktor-faktor budaya, pribadi, dan situasional. Selain itu, juga dipengaruhi oleh lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan akses terhadap informasi (Ajzen & Fishbein, 2005).

B. Sekolah Inklusif

1. Pengertian

Dalam pasal 1 Permendiknas No.70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa dinyatakan bahwa pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan

Untuk sitasi (*citation*), tuliskan: Herlina. (2010). *Sikap Guru Sekolah Dasar terhadap Penyelenggaraan Sekolah Inklusif*. Bandung: Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. (Tesis)

kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Selanjutnya pada pasal 2 peraturan menteri tersebut dinyatakan bahwa tujuan pendidikan inklusif adalah untuk (1) memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; dan (2) mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada huruf a. Jadi, semangat pendidikan inklusif adalah memberi akses yang seluas-luasnya kepada semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya (Ditplb, 2007:9).

Menurut Sapon-Sevin (Dyah, 2008), pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya. Jadi, pendidikan inklusif adalah pendidikan yang memberikan layanan terhadap semua anak tanpa memandang kondisi fisik, mental, intelektual, sosial, emosi, ekonomis, jenis kelamin, suku budaya, tempat tinggal, bahasa dan sebagainya,

dimana semua anak belajar bersama-sama, baik di kelas/sekolah formal maupun

Untuk sitasi (*citation*), tuliskan: Herlina. (2010). *Sikap Guru Sekolah Dasar terhadap Penyelenggaraan Sekolah Inklusif*. Bandung: Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. (Tesis)

nonformal yang berada di dekat tempat tinggalnya yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing anak.

Sekolah inklusif adalah sekolah yang menampung semua murid di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap murid maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru agar anak-anak berhasil (Stainback, 1980). Sedangkan menurut Choate (Dyah, 2008:5), sekolah inklusif adalah sekolah yang mengizinkan peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus untuk dapat belajar di kelas pendidikan umum.

Dalam penjelasan pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.

Dari definisi-definisi di atas dapat dirumuskan bahwa sekolah inklusif adalah sekolah yang mengizinkan peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus untuk dapat belajar di kelas pendidikan umum, dimana peserta didik berkebutuhan khusus mendapatkan pelayanan pendidikan utama di dalam kelas umum dan di bawah tanggung jawab seorang guru kelas umum, serta menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi disesuaikan

dengan kemampuan dan kebutuhan setiap murid maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru, agar anak-anak berhasil.

2. Karakteristik Sekolah Inklusif

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan dalam Alimin (2008), Tarsidi (2008), dan Sunanto, dkk (2004), maka dapat disimpulkan bahwa sekolah inklusif memiliki karakteristik/ciri sebagai berikut:

1. ***Tidak diskriminatif.*** Artinya, sekolah inklusif harus memberikan layanan pendidikan kepada setiap anak tanpa kecuali.
2. ***Pengakuan dan penghargaan terhadap keragaman individu anak.*** Berarti sekolah inklusif harus menyediakan kondisi kelas yang hangat, ramah, menerima keanekaragaman dan menghargai perbedaan; harus siap mengelola kelas yang heterogen dengan menerapkan kurikulum dan pembelajaran yang bersifat individual, bersifat fleksibel dan dinamis, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan anak; iklim belajar sesuai dengan prinsip-prinsip CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif) yang sesuai kemampuan dan perkembangan anak.
3. ***Fasilitas belajar dan lingkungan memberi kemudahan dan rasa aman kepada setiap anak;*** sarana fisik sekolah memudahkan, aman dan nyaman untuk digunakan oleh setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus (aksesibel). Menurut Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, "Aksesibilitas adalah kemudahan yang

Untuk sitasi (*citation*), tuliskan: Herlina. (2010). *Sikap Guru Sekolah Dasar terhadap Penyelenggaraan Sekolah Inklusif*. Bandung: Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. (Tesis)

disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan." Diperjelas dengan pasal 10 ayat 2 undang-undang yang sama, "Penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang penyandang cacat dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat." Sejalan dengan itu, yang dimaksud dengan aksesibilitas fisik adalah lingkungan fisik yang oleh penyandang cacat dapat dihampiri, dimasuki atau dilewati, dan penyandang cacat itu dapat menggunakan wilayah dan fasilitas yang terdapat di dalamnya tanpa bantuan. Dalam pengertian yang lebih luas, aksesibilitas fisik mencakup akses terhadap berbagai bangunan, alat transportasi dan komunikasi, serta berbagai fasilitas di luar ruangan termasuk sarana rekreasi.

4. ***Guru bekerja dalam tim.*** Guru dituntut melakukan kolaborasi dengan profesi atau sumberdaya lain dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Proses pembelajaran tidak terkotak-kotak, tetapi merupakan pembelajaran terpadu dengan menerapkan tim interdisipliner.
5. ***Keterlibatan orang tua dan masyarakat terhadap sekolah.*** Guru dituntut melibatkan orang tua secara bermakna dalam proses pendidikan. Keterlibatan orang tua secara aktif terhadap pendidikan anak di sekolah, sangat penting dalam kaitannya dengan negosiasi dalam mencari solusi berkenaan dengan pendidikan anak baik di sekolah maupun di rumah. Selain itu juga ada keterlibatan dan partisipasi LSM dan masyarakat yang lebih luas.

Untuk sitasi (*citation*), tuliskan: Herlina. (2010). *Sikap Guru Sekolah Dasar terhadap Penyelenggaraan Sekolah Inklusif*. Bandung: Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. (Tesis)

Specht (2009) menyatakan bahwa berdasarkan penelitian, sekolah inklusif yang efektif memiliki karakteristik-karakteristik berikut ini:

a. *Lingkungan yang suportif*

Budaya dan iklim sekolah merujuk pada atmosfer, nilai, dan kebijakan sekolah. Faktor-faktor ini mengarah pada harapan dan perilaku tertentu dari staf sekolah maupun siswa. Sekolah yang efektif merupakan sekolah yang memiliki harapan yang tinggi terhadap staf dan siswa, memberikan dukungan terhadap siswa dan staf, dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk berpartisipasi baik dalam setting kelas maupun lingkup sekolah yang lebih luas. Atmosfir sekolah yang ramah, budaya sekolah yang menerima perbedaan perilaku di kelas, dan tidak membuat asumsi tentang kemampuan anak, akan meningkatkan perasaan diterima.

b. *Hubungan yang positif*

Guru membangkitkan perkembangan hubungan melalui keputusan mereka tentang tempat duduk anak di dalam kelas. Tindakan yang lebih formal mencakup menunjukkan model peran kepada siswa dan membangun hubungan pertemanan (*buddy relationship*). Beberapa strategi dapat digunakan untuk meningkatkan inklusi sosial semua anak.

c. *Perasaan mampu (kompeten)*

Untuk sitasi (*citation*), tuliskan: Herlina. (2010). *Sikap Guru Sekolah Dasar terhadap Penyelenggaraan Sekolah Inklusif*. Bandung: Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. (Tesis)

Anak-anak perlu yakin bahwa mereka memiliki kemampuan dalam sesuatu dan yakin bahwa orang lain percaya bahwa mereka akan berhasil. Anak dapat mengembangkan konsep diri yang kuat dalam berbagai area berbeda. Anak-anak dapat merasa kompeten dalam area yang berhubungan dengan kemampuan dan kualitas sosial, atletik, moral, dan kreatif, serta dalam kemampuan untuk belajar. Dengan memahami area kekuatan mereka, anak-anak akan menghargai diri mereka sendiri dan mengembangkan rasa menghargai diri sendiri (rasa harga diri).

d. *Kesempatan untuk berpartisipasi*

Semua anak membutuhkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang memberikan mereka kesempatan untuk memahami harapan masyarakat. Mereka bisa memperoleh kompetensi fisik dan sosial yang dibutuhkan untuk berfungsi di sekolah, rumah, dan masyarakat luas. Dengan demikian, mereka juga akan memperoleh pemahaman tentang kekuatan mereka dan hubungan mereka dengan orang lain.

3. Sekolah Inklusif sebagai Sebuah Sistem

Sistem ialah rangkaian komponen yang saling berkaitan dan berfungsi ke arah tercapainya tujuan sistem yang telah ditetapkan lebih dahulu (Warijan, dkk., dalam Suplirahim, 2005).

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang artinya saling bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen-

Untuk sitasi (*citation*), tuliskan: Herlina. (2010). *Sikap Guru Sekolah Dasar terhadap Penyelenggaraan Sekolah Inklusif*. Bandung: Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. (Tesis)

komponen sistem atau elemen-elemen sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagian-bagian dari sistem. Setiap sistem selalu mengandung komponen-komponen atau subsistem-subsistem. Setiap subsistem mempunyai sifat-sifat dari sistem untuk menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. Jika dalam suatu sistem ada subsistem yang tidak berjalan/berfungsi sebagaimana mestinya, maka sistem tersebut tidak akan berjalan mulus atau mungkin juga sistem tersebut rusak sehingga dengan sendirinya tujuan sistem tersebut tidak tercapai.

Elemen-elemen suatu sistem terdiri atas masukan (*input*), proses, keluaran (*output*), dan hasil (*outcomes*) (Manhuri, 2008).

Sekolah sebagai suatu sistem terdiri atas beberapa elemen yang masing-masing mempunyai hubungan yang saling berkaitan, tidak dapat dipisahkan, serta saling mempengaruhi, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan teori *input-process-output*, elemen sekolah sebagai suatu sistem tersebut dapat dikelompokkan menjadi (Manhuri, 2008):

- a. *Input* atau masukan, yaitu segala sesuatu yang diperlukan oleh sistem sekolah untuk menghasilkan keluaran yang diharapkan. Masukan mencakup masukan baku, masukan instrumental, dan masukan lingkungan.
 - 1) Elemen masukan baku (*raw input*) adalah peserta didik yang mengikuti proses pembelajaran, dengan segala karakteristiknya.
 - 2) Elemen masukan instrumental (*instrumental input*), yaitu guru, sarana prasarana, kurikulum, dana, pengelolaan sekolah.

Untuk sitasi (*citation*), tuliskan: Herlina. (2010). *Sikap Guru Sekolah Dasar terhadap Penyelenggaraan Sekolah Inklusif*. Bandung: Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. (Tesis)

- 3) Elemen masukan lingkungan (*environmental input*), yaitu segala sesuatu yang berada di luar lingkup sekolah, meliputi : alam, sosial, ekonomi dan budaya.
- b. *Proses*, yaitu segala kegiatan yang dilakukan oleh sekolah, termasuk segala proses yang terjadi di dalam sekolah/kelas dalam rangka mengubah masukan untuk menghasilkan pengeluaran yang ditargetkan. Proses di sini mencakup kegiatan belajar mengajar, kegiatan pengelolaan sekolah, dan kegiatan administrasi sekolah.
 - c. *Output* atau keluaran, adalah segala sesuatu yang secara langsung dihasilkan sistem pendidikan, yaitu berupa jumlah siswa yang tamat dan lulus dari sekolah, hasil belajar siswa yang berada dalam bentuk ranah kognitif, afektif, dan keterampilan.
 - d. *Outcomes* atau hasil, yaitu segala hasil yang diperoleh oleh tamatan di masyarakat sebagai hasil pendidikan, mencakup daya serap lulusan yang memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi, berapa yang dapat memperoleh lapangan kerja, dan sebagainya.

4. Pengertian Penyelenggaraan Sekolah Inklusif

Merujuk pada paparan di atas tentang karakteristik sekolah inklusif maupun tentang sekolah inklusif sebagai sebuah sistem, maka penyelenggaraan sekolah inklusif diartikan sebagai praktik menfungsikan elemen-elemen sekolah (baik elemen *input*, proses, *output*, maupun *outcomes*) sesuai dengan karakteristik

Untuk sitasi (*citation*), tuliskan: Herlina. (2010). *Sikap Guru Sekolah Dasar terhadap Penyelenggaraan Sekolah Inklusif*. Bandung: Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. (Tesis)

sekolah inklusif. Jadi, dalam penyelenggaraan sekolah inklusif, ciri-ciri sekolah inklusif mendasari fungsi maupun interaksi setiap elemen sekolah.

5. Hambatan dan Tantangan Penyelenggaraan Sekolah Inklusif

Penyelenggaraan sekolah inklusif bukan merupakan hal yang mudah. Berikut adalah beberapa faktor yang menghambat keberhasilan penyelenggaraan sekolah inklusif (Stubbs, 2002:60), yaitu:

- a. Sumber daya manusia, meliputi sikap, kurang pengetahuan, ketakutan, prasangka, terlalu terspesialisasi, kompetisi, kurang pengalaman menghadapi perbedaan, pemikiran yang stereotipik.
- b. Uang dan materi, meliputi kurangnya peralatan, gaji yang rendah, sumber-sumber yang tidak terdistribusikan secara merata, bangunan yang tidak aksesibel.
- c. Pengetahuan dan informasi, meliputi kurangnya keterampilan baca tulis, kebijakan yang buruk atau tidak ada kebijakan sama sekali, kurangnya berbagi masalah dan pemecahannya secara kolektif.
- d. Budaya dalam pendidikan yang terlalu banyak penekanan pada pencapaian akademik dan ujian dan kurang penekanan pada perkembangan anak secara menyeluruh.
- e. Sistem pendidikan khusus segregasi yang telah ada sebelumnya. Ini sering menjadi hambatan terbesar karena guru-guru umum tidak memandangnya

Untuk sitasi (*citation*), tuliskan: Herlina. (2010). *Sikap Guru Sekolah Dasar terhadap Penyelenggaraan Sekolah Inklusif*. Bandung: Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. (Tesis)

sebagai “pekerjaan mereka (guru umum) untuk mengajar“ anak-anak itu (anak berkebutuhan khusus).

Dari berbagai hambatan tersebut di atas, salah satu hambatan utama implementasi pendidikan inklusif adalah sikap negatif. Menurut Susie Miles (2000), “hambatan sikap terhadap inklusi sedemikian besar sehingga tingkat ketersediaan sumber daya tidak relevan” (Stubbs, 2002 : 55).

Dengan adanya hambatan-hambatan di atas, maka tantangan yang harus dihadapi untuk menyelenggarakan sekolah inklusif tidak hanya menyusun legislasi dan peraturan, melainkan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut (Skjørten, 2001:14):

- a. Perubahan hati dan sikap.
- b. Reorientasi yang berkaitan dengan asesmen, metode pengajaran dan manajemen kelas, termasuk penyesuaian lingkungan.
- c. Redefinisi peran guru dan realokasi sumber daya manusia.
- d. Redefinisi peran SLB yang ada. Misalnya, dapatkah sekolah-sekolah ini secara bertahap mulai berfungsi sebagai pusat sumber yang ekstensif?
- e. Penyediaan bantuan profesional bagi para guru dalam bentuk reorientasi pendidikan guru sehingga guru-guru baru dapat memberikan kontribusi kepada proses menuju inklusi dan bersikap fleksibel jika diperlukan.

Untuk sitasi (*citation*), tuliskan: Herlina. (2010). *Sikap Guru Sekolah Dasar terhadap Penyelenggaraan Sekolah Inklusif*. Bandung: Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. (Tesis)

- f. Reorientasi pelatihan dalam jabatan dan penataran guru, kepala sekolah dan guru kelas sehingga mereka juga akan dapat memberikan kontribusi terhadap proses menuju inklusi dan bersikap fleksibel jika diperlukan.
- g. Layanan guru kunjung menurut kebutuhan.
- h. Pembentukan, peningkatan, dan pengembangan kemitraan antara guru dan orang tua, demi saling reorientasi dan melakukan peningkatan serta pertukaran pengalaman, bantuan dan nasehat.

C. Hasil-Hasil Penelitian tentang Sikap Guru terhadap Sekolah Inklusif

Sejalan dengan implementasi pendidikan inklusif, banyak peneliti dari berbagai negara melakukan penelitian tentang pendidikan inklusif, dalam hal ini sikap guru terhadap pendidikan inklusif.

Jika dirangkum, maka hasil-hasil penelitian tersebut dapat dibagi menjadi beberapa kelompok variabel yang mempengaruhi sikap, sebagai berikut:

1. Jenis Sekolah.

- a. Hasil penelitian Cochran (1998) dengan menggunakan *STATIC (The Scale Of Teachers' Attitude Toward Inclusive Classroom)* menunjukkan bahwa guru pendidikan khusus memiliki sikap lebih positif terhadap pendidikan inklusif dibandingkan dengan guru umum. Guru sekolah dasar memiliki sikap lebih positif terhadap pendidikan inklusif dibandingkan dengan guru

Untuk sitasi (*citation*), tuliskan: Herlina. (2010). *Sikap Guru Sekolah Dasar terhadap Penyelenggaraan Sekolah Inklusif*. Bandung: Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. (Tesis)

SMP, namun perbedaan antara guru pendidikan khusus dengan guru umum lebih besar dibandingkan dengan perbedaan antara guru SD dengan SMP.

- b. Hasil penelitian Kubyana (2005) menunjukkan bahwa guru SLB di Johannesburg memiliki sikap negatif terhadap pendidikan inklusif.
- c. Banyak guru kelas umum mempertimbangkan kelas khusus dalam penempatan optimal terhadap siswa berkebutuhan khusus (Glickling & Theobald, 1975; Hudson, Graham, & Warner, 1979; Minke, Bear, Deemer, & Griffin, 1996; Moore & Fine, 1978; Vaughn, Schumn, Jallad, Slusher, & Saumell, 1996; dan Yasutake & Lerner, 1996 dalam Bunch & Finnegan, 2000).

2. Latar Belakang Pendidikan dan Pelatihan

- a. Dalam pendidikan inklusif, guru bertanggung jawab mengajar semua siswa, baik yang berkebutuhan khusus maupun yang umum. Penelitian Bennett, Bruns, dan De Luca (1997) menunjukkan bahwa untuk memberikan pengajaran bagi semua anak tersebut, guru perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai, sedangkan hasil penelitian Cochran (1998) dalam Waligore (2002) menunjukkan bahwa untuk keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif, maka para guru harus mendapatkan pelatihan mengenai praktek pendidikan inklusif (Waligore, 2002:3). Hasil penelitian Waligore (2002) menunjukkan bahwa keyakinan guru tentang

Untuk sitasi (*citation*), tuliskan: Herlina. (2010). *Sikap Guru Sekolah Dasar terhadap Penyelenggaraan Sekolah Inklusif*. Bandung: Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. (Tesis)

pengetahuan dan pelatihan berperan penting dalam menangani kelas inklusif.

- b. Hasil penelitian Mangunsong (2006) di Jakarta menunjukkan bahwa perlu ada pelatihan khusus tentang pendidikan inklusif, khususnya untuk guru-guru sekolah umum sehingga mereka memiliki pemahaman yang lebih dalam dan mendukung implementasi pendidikan inklusif.
- c. Tingkat perkembangan profesional guru berhubungan secara signifikan dengan sikap terhadap pendidikan inklusif (Avramidis, Bayliss, & Burden, 2000).
- d. Beberapa guru sekolah umum menyatakan bahwa mereka telah memilih untuk mengajar bidang ilmu tertentu dan bukan pendidikan khusus, dan kebijakan tentang pendidikan inklusif telah memaksa mereka untuk memasuki area yang tidak mereka yakini atau minati (Vaughn, et.al, 1996 dalam Ali, Mustapha, & Jelas, 2006).
- e. Mock and Kauffman (2002) dalam Ali, Mustapha, & Jelas (2006) menjelaskan bahwa para guru terjebak: di satu sisi, guru tidak dapat dipersiapkan untuk menjawab kebutuhan pendidikan unik setiap siswa berkebutuhan khusus, dan di sisi lain, guru dalam kelas inklusif mengajar siswa-siswa berkebutuhan khusus, melebihi kemampuan hasil pelatihan dan spesialisasi mereka.
- f. Penelitian Sharma, dkk (2006) yang dilakukan terhadap para calon guru di Australia, Kanada, Hongkong, dan Singapura menunjukkan adanya

Untuk sitasi (*citation*), tuliskan: Herlina. (2010). *Sikap Guru Sekolah Dasar terhadap Penyelenggaraan Sekolah Inklusif*. Bandung: Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. (Tesis)

perbedaan. Para calon guru dari Australia dan Kanada memiliki sikap yang lebih positif terhadap siswa-siswa *disable* dibandingkan dengan calon guru dari Hongkong dan Singapura. Namun studi ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar calon guru memiliki sikap positif terhadap orang-orang *disable* dan inklusi, dan lebih percaya diri dalam menerapkan inklusi setelah memperoleh pelatihan inklusi dan/atau pengalaman dengan orang-orang *disable*.

- g. Sejalan dengan penelitian di atas, hasil penelitian Suban dan Sharma (2006) terhadap para guru sekolah dasar di Victoria Australia menunjukkan bahwa para guru SD yang pernah memperoleh pelatihan dalam pendidikan khusus lebih memiliki sikap positif terhadap pendidikan inklusif dan tidak mempermasalahkan implementasi pendidikan inklusif. Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa partisipan yang memiliki anggota keluarga *disable*, dan partisipan yang memiliki pengetahuan tentang Disability Discrimination Act tahun 1992 lebih memiliki sikap positif terhadap inklusi siswa *disable*. Sedangkan partisipan yang memiliki sahabat *disable* maupun yang merasa yakin dengan peran mereka sebagai pendidik inklusif, tidak merasa khawatir dengan implementasi pendidikan inklusif.

3. Pengalaman Menangani Anak Berkebutuhan Khusus

- a. Hasil penelitian Haider (2008) di Pakistan menunjukkan bahwa guru-guru yang berpengalaman dalam berinteraksi/menangani anak berkebutuhan

Untuk sitasi (*citation*), tuliskan: Herlina. (2010). *Sikap Guru Sekolah Dasar terhadap Penyelenggaraan Sekolah Inklusif*. Bandung: Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. (Tesis)

khusus memiliki sikap lebih positif terhadap pendidikan inklusif dibandingkan dengan yang kurang berpengalaman.

- b. Hasil penelitian Marston & Leslie (1983) dan Rizzo & Vispoel (1991), dalam Elliot (2008) menunjukkan bahwa sikap guru lebih *favorable* bila memiliki pengalaman lebih banyak dalam mengajar anak-anak *disable*.
- c. Hasil penelitian Lindeman & Adams (1997) menunjukkan bahwa pengalaman membawa pada perasaan lebih kompeten dan sikap lebih positif terhadap pendidikan inklusif pada guru-guru yang terlibat dalam program inklusif kolaboratif Head Start, namun penelitian Leyser & Lessen (1985) menemukan tidak adanya perbedaan yang signifikan pada sikap terhadap pendidikan inklusif antara guru-guru yang menerima pelatihan dan pengalaman dengan guru-guru yang hanya menerima pelatihan; dan berlawanan pula dengan hasil penelitian Bennet, dkk (1997) yang menemukan tidak adanya hubungan yang signifikan antara pengalaman praktisi yang menangani anak-anak usia dini yang *disable* dengan sikapnya terhadap inklusi (Kuntsmann, 2003).
- d. Hasil penelitian Vaughn dkk (1996) dalam Waligore (2002) menunjukkan bahwa guru umum dan SLB yang belum terlibat dalam pendidikan inklusif memiliki perasaan negatif terhadap program inklusif dan menganggap bahwa pemegang keputusan tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif tidak realistis terhadap situasi kelas.

- e. Guru-guru dengan pengalaman aktif dalam pendidikan inklusif bersikap lebih positif terhadap pendidikan inklusif dibandingkan dengan guru lain yang belum berpengalaman (Avramidis, Bayliss, & Burden, 2000).

4. Jumlah Siswa di Kelas

- a. Hasil penelitian Galis (1995) menunjukkan bahwa para guru menginginkan jumlah maksimal siswa per kelas sebaiknya dikurangi bila siswa penyandang ketunaan ditempatkan di kelas umum.
- b. Guru memandang bahwa pendidikan inklusif menambah beban kerja mereka, sehingga mereka bersikap negatif terhadap pendidikan inklusif. (Heflin and Bullock, 1999 dalam Olson, 2003). Kekhawatiran lain dari guru pendidikan umum adalah bahwa prestasi akademik kelas secara keseluruhan akan menurun, atau guru yang nanti akan menangani siswa berkebutuhan khusus akan memperoleh persepsi negatif dari guru sebelumnya yang telah meluluskan siswa berkebutuhan khusus ke jenjang berikutnya tanpa menguasai materi (McLeskey and Waldron, 2002 dalam Olson, 2003).
- c. Penelitian Gaad & Khan (2007) menunjukkan bahwa guru memerlukan waktu tambahan untuk merencanakan dan berkolaborasi dengan guru pendukung. Para guru menginginkan ada pengurangan jumlah siswa dalam kelas jika mereka dituntut untuk menangani anak berkebutuhan khusus di kelasnya.

Untuk sitasi (*citation*), tuliskan: Herlina. (2010). *Sikap Guru Sekolah Dasar terhadap Penyelenggaraan Sekolah Inklusif*. Bandung: Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. (Tesis)

- d. Para guru menyetujui persamaan hak untuk memperoleh pendidikan antara anak berkebutuhan khusus dengan anak lainnya. Namun mereka lebih menyukai disediakan kelas khusus dalam situasi yang menuntut terlalu banyak waktu dari guru kelas dalam upaya memenuhi kebutuhan siswa berkebutuhan khusus (Gaad & Khan, 2007).
- e. Tetapi ada bukti-bukti bahwa faktor ukuran kelas (banyaknya siswa di kelas) memiliki pengaruh yang kurang signifikan dibandingkan dengan beberapa factor lain yang diperlukan untuk meningkatkan pelaksanaan kelas inklusif. Penelitian Rose & Coles (2002) dalam Rose, et.al. (2007) tentang pengalaman guru dalam menangani siswa berkebutuhan khusus yang belajar di SD dan SMP umum di Inggris menunjukkan bahwa guru yang berpengalaman mengelola kelas inklusif kurang terpengaruh oleh ukuran kelas dibandingkan dengan guru yang belum berpengalaman. Dalam studi mereka, dukungan kelas dan pelatihan yang tepat/sesuai dipandang sebagai factor yang lebih signifikan dalam memberikan situasi kelas yang kondusif untuk praktek inklusif.

5. Jenis dan Tingkat Hambatan/Kebutuhan Khusus

- a. Siswa-siswa dengan kesulitan emosional dan perilaku dipandang lebih menyebabkan kerisauan dan stress dibandingkan dengan jenis kebutuhan khusus lainnya (Avramidis, Bayliss, & Burden, 2000).

Untuk sitasi (*citation*), tuliskan: Herlina. (2010). *Sikap Guru Sekolah Dasar terhadap Penyelenggaraan Sekolah Inklusif*. Bandung: Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. (Tesis)

- b. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Gaad dan Khan (2007) menunjukkan guru-guru sekolah umum mempertahankan opini bahwa siswa berkebutuhan khusus mengganggu siswa lain di kelas. Para guru bersikap positif terhadap siswa berkesulitan belajar, beberapa dari para guru tersebut berpendapat bahwa siswa dengan gangguan perilaku, kecacatan fisik, dan gangguan kesehatan dapat diinklusi ke dalam kelas umum. Tetapi, para guru bersikap negatif terhadap inklusi siswa yang memiliki gangguan pendengaran (*hearing impairment*), gangguan komunikasi (*communication disorder*), hambatan intelektual (*intellectual challenges*) dan kesulitan belajar ganda dan berat (*PMLD = Profound and Multiple Learning Disabilities*).
- c. Hasil penelitian Al Zyoudi (2006) di Jordania menunjukkan bahwa siswa dengan hambatan fisik seharusnya diinklusi. Siswa yang dianggap paling tidak dapat diinklusi adalah siswa dengan hambatan intelektual dan bermasalah dalam perilaku yang mempengaruhi kemampuan membaca, menulis, dan aritmatika. Guru yang mengajar siswa dengan hambatan penglihatan memiliki sikap positif terhadap inklusi siswa dengan hambatan penglihatan, demikian pula dengan guru-guru yang memiliki pengalaman menangani siswa dengan hambatan lain seperti hambatan bicara dan bahasa, hambatan pendengaran, dan hambatan fisik. Tetapi, tanpa memperhatikan pengalaman, semua partisipan menunjukkan sikap negatif terhadap inklusi siswa terbelakang mental yang mempengaruhi kemampuan membaca, menulis, dan aritmatika, khususnya siswa dengan hambatan intelektual sedang dan berat.

Untuk sitasi (*citation*), tuliskan: Herlina. (2010). *Sikap Guru Sekolah Dasar terhadap Penyelenggaraan Sekolah Inklusif*. Bandung: Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. (Tesis)

- d. Penelitian Oki Aminawa (2008) terhadap kepala sekolah dan guru di Jawa Barat yang telah melaksanakan pendidikan inklusif menunjukkan bahwa terdapat pengaruh minat dan pelatihan pada sikap kepala sekolah dan guru terhadap pendidikan inklusif, sementara faktor usia, masa kerja, status kepegawaian (PNS – nonPNS) dan tingkat pendidikan tidak berpengaruh.

6. Penelitian yang menguji sekaligus beberapa variabel di atas

- a. Hasil penelitian Cochran (1998) menunjukkan bahwa guru umum dengan pengalaman kerja 1 tahun memiliki sikap lebih positif terhadap pendidikan inklusif dibandingkan dengan guru yang memiliki pengalaman kerja selama 4-5 tahun, 6-10 tahun, dan lebih dari 10 tahun. Tapi perbedaan ini tidak terjadi pada guru pendidikan khusus. Diduga hal ini terjadi karena guru-guru umum dengan pengalaman satu tahun lebih optimistik terhadap pendidikan inklusif dibandingkan dengan guru umum yang berpengalaman lebih lama; selain itu juga adanya kecenderungan yang merefleksikan perubahan dalam program pendidikan guru dan filosofi yang berkaitan dengan pendidikan inklusif. Penelitian Ward, Center, dan Bochner (1994) dalam Cochran (1998) juga menunjukkan bahwa guru yang berpengalaman bereaksi negatif terhadap ciri dan jenis ketunaan siswa.
- b. Woolfson & Grant (2005:1) menunjukkan beberapa hasil penelitian berikut ini: melalui meta analisis, Scruggs dan Mastropieri telah melakukan meta analisis sepanjang periode 1958-1995 dan menyatakan bahwa mayoritas

Untuk sitasi (*citation*), tuliskan: Herlina. (2010). *Sikap Guru Sekolah Dasar terhadap Penyelenggaraan Sekolah Inklusif*. Bandung: Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. (Tesis)

guru setuju terhadap inklusi sebagai prinsip, namun hanya 40% yang memandangnya sebagai realistis; Villa, Thousand, Meyers, dan Nevin (1996) menemukan bahwa guru-guru yang telah berpengalaman dengan inklusi lebih bersedia menginklusi anak-anak berkebutuhan khusus ke dalam kelas umum dan tampak lebih yakin setelah mengembangkan keterampilan profesional; Soodak, Podell, dan Lehman (1998) menemukan bahwa guru-guru menjadi lebih memusuhi (hostile) inklusi setelah mendapatkan pengalaman inklusi; Avramidis dan Norwich (2002) dalam reviu tentang sikap dari tahun 1984-2000 menyatakan bahwa guru-guru kurang mau menerima inklusi siswa berkesulitan belajar dibandingkan dengan inklusi siswa yang memiliki hambatan fisik dan sensoris; Tait dan Purdie (2000) menemukan bahwa guru-guru umum tidak selalu bersespons positif terhadap inklusi siswa berkesulitan belajar.

- c. Hasil penelitian Bunch & Finnegan (2000) di Kanada menunjukkan bahwa guru memandang pelaksanaan pendidikan inklusif memiliki efek negatif terhadap guru kelas. Efek negatif ini berkaitan dengan: 1) pandangan guru tentang kekurangsesuaian tingkat persiapan profesional, baik dalam pelatihan preservice maupun inservice; 2) pandangan guru bahwa siswa umum menjadi kurang diperhatikan karena guru harus mencurahkan banyak waktu bagi anak berkebutuhan khusus; 3) keyakinan guru kelas bahwa mereka kekurangan perlengkapan, sumber, dan waktu untuk menangani anak berkebutuhan khusus. Jadi, pendidikan inklusif dipandang sebagai penambahan beban pekerjaan bagi guru kelas. Akan tetapi, hasil

Untuk sitasi (*citation*), tuliskan: Herlina. (2010). *Sikap Guru Sekolah Dasar terhadap Penyelenggaraan Sekolah Inklusif*. Bandung: Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. (Tesis)

penelitian juga menunjukkan bahwa pandangan-pandangan negatif tersebut berkurang seiring dengan bertambahnya pengalaman guru dalam mengajar anak berkebutuhan khusus di kelas umum.

- d. Para guru berpandangan bahwa makin banyak siswa diinklusi, maka guru makin membutuhkan peralatan dan keterampilan tambahan untuk mengatasi masalah sosial dan emosional yang menyertai pelaksanaan sekolah inklusif (Idol, 1997 dalam Ali, Mustapha, & Jelas, 2006). Vaughn, Schumm, Jallad, Slusher & Samuell (1996) dalam Ali, Mustapha, & Jelas (2006) menyebutkan beberapa aspek yang mungkin menyebabkan guru menolak inklusi, seperti jumlah siswa dalam kelas, kekurangan anggaran, kelebihan beban kerja guru, kesulitan dalam melakukan evaluasi yang terstandar. Sedangkan Danne & Beirne-Smith (2000) dalam Ali, Mustapha, & Jelas (2006) menemukan bahwa guru-guru menunjuk kurangnya kerja tim dan menuntut bimbingan dalam menangani anak berkebutuhan khusus.
- e. Walaupun ada keuntungan dari inklusi, dan tanpa memperhatikan komitmen dan sikap positif guru; dan meskipun para guru memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan berbagai siswa, guru dirisaukan dengan penyesuaian akademik, sosial, dan perilaku siswa-siswa berkebutuhan khusus di kelas inklusif. Beberapa guru merasa bahwa inklusi hanya memberikan sedikit manfaat bagi anak berkebutuhan khusus, dan akibatnya mereka mempertanyakan keuntungan pendidikan inklusif (Heiman, 2002; Priestley & Rabiee, 2002 dalam Ali, Mustapha, & Jelas, 2006).

Untuk sitasi (*citation*), tuliskan: Herlina. (2010). *Sikap Guru Sekolah Dasar terhadap Penyelenggaraan Sekolah Inklusif*. Bandung: Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. (Tesis)

- f. Dari survey tentang sikap guru pendidikan umum dan guru pendidikan khusus terhadap pendidikan inklusif, khususnya inklusi siswa dengan gangguan emosional dan/atau perilaku ditemukan bahwa masalah utama yang dihadapi para guru tersebut adalah: dukungan dan pelatihan yang tidak memadai, rasio yang tidak proporsional (lebih banyak anak berkebutuhan khusus daripada anak normal), guru merasa tidak disiapkan untuk memenuhi kebutuhan akademik siswa berkebutuhan khusus, issue manajemen perilaku, dan terlalu banyak waktu yang tersita untuk kolaborasi dan adaptasi kurikulum. Secara umum, hasil studi menunjukkan bahwa guru pendidikan khusus dan pendidikan umum setuju mengenai manfaat dari pendidikan inklusif, tapi mereka juga setuju bahwa tidak semua adaptasi telah dibuat dan bahwa tidak semua kebutuhan anak dapat dipenuhi di kelas pendidikan umum (Heflin and Bullock, 1999 dalam Olson, 2003).
- g. Mayoritas guru umum juga merasa bahwa siswa berkebutuhan khusus kurang memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menguasai materi pelajaran di kelas umum. Seluruh guru dalam survey menunjukkan bahwa guru-guru umum memikul beban kerja terlalu berat jika para siswa berkebutuhan khusus diinklusi (Gaad & Khan, 2007).

Untuk sitasi (*citation*), tuliskan: Herlina. (2010). *Sikap Guru Sekolah Dasar terhadap Penyelenggaraan Sekolah Inklusif*. Bandung: Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. (Tesis)